
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN DAN PEMANFAATAN ALOKASI DANA DESA DI DESA TANJUNG JORONG KECAMATAN TUALAN HULU KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Community Participation in Planning and Utilization of Village Fund Allocation in Tanjung Jorong Village, Tualan Hulu District, East Kotawaringin Regency

Indah Megawaty*
Hermanus Febry

Universitas Muhammadiyah
Palangkaraya, Palangka Raya, Central
Kalimantan, Indonesia

email:
indah.megawati@umpalangkaraya.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pemanfaatan alokasi dana desa di Desa Tanjung Jorong Kecamatan Tualan Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan deskriptif kualitatif, yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Bangkuang, Staff Desa dan beberapa orang masyarakat Desa Tanjung Jorong Kecamatan Tualan Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat Desa Tanjung Jorong dapat dilihat pada tahap perencanaan, pemanfaatan maupun pengawasan tergolong rendah. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Pusic (2006) bahwa perencanaan tanpa memperhitungkan partisipasi masyarakat akan menjadikan perencanaan hanya di atas kertas. Dan Faktor pendukung dan penghambat yakni a) Dukungan dari pemerintah kabupaten dan pemerintah desa yang berkooperatif dan komunikatif dalam meregulasi ADD di wilayah Desa Tanjung Jorong sehingga pelaporan pertanggungjawaban dapat dilaporkan dengan waktu yang telah ditentukan b) Sikap pemerintah desa yang transparan, akuntabel dalam pemanfaatannya c) Keterbatasan pada dana ADD yang masih minimalis.

Kata Kunci:

Partisipasi Masyarakat
Perencanaan
Pemanfaatan
Alokasi Dana Desa

Keywords:

Community Participation
Planning
Utilization
Allocation of village funds

Accepted

June 2017

Published

Oktober 2017

Abstract

The purpose of this study was to find out how community participation in planning and utilization of village fund allocations in Tanjung Jorong Village, Tualan Hulu District, East Kotawaringin Regency. The method used in this study is a descriptive qualitative approach, which is the source of data in this study, namely the Chief of Bangkuang Village, Village Staff and several people in Tanjung Jorong Village, Tualan Hulu Sub-District, East Kotawaringin Regency. Data collection techniques carried out by observation, interviews, and documentation. The results of this study indicate that the level of participation of the Tanjung Jorong Village community can be seen in the stages of planning, utilization, and supervision classified as low. As expressed by Pusic (2006) that planning without taking into account community participation will make planning only on paper. And supporting and inhibiting factors are a) Cooperative and communicative support from the district government and village government in regulating ADD in Tanjung Jorong Village area so that accountability reporting can be reported with a predetermined time b) Village government attitudes that are transparent, accountable in utilizing ADD and c) Limitations on ADD funds that are still minimalist.

PENDAHULUAN

Desa sebagai sistem pemerintahan terkecil menuntut adanya pembaharuan guna mendukung pembangunan desa yang lebih meningkat dan tingkat kehidupan masyarakat desa yang jauh dari kemiskinan. Berbagai permasalahan yang ada di desa dan sangat kompleks, menjadikan batu sandungan bagi desa untuk berkembang.

Pelimpahan kewenangan kepada desa tersebut dapat menjadikan instrumen dan solusi yang tepat untuk mewujudkan akselerasi pembangunan di desa. Meskipun harus juga diimbangi dengan pendukung lainnya, seperti kemampuan dan mentalitas aparat pemerintah desa maupun sikap responsif masyarakat desa untuk secara konstruktif dan bertahap berupaya meningkatkan kesejahteraannya. Atas dasar pertimbangan itulah,

maka untuk menunjukkan eksistensi desa sebagai bagian dari pemerintahan langkah awalnya dengan memberikan kewenangan kepada desa untuk mengelola keuangannya sendiri melalui pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pengelolaan keuangan desa yang diberikan kepada daerah melalui ADD pada prinsipnya tetap mengacu pada pokok pengelolaan keuangan daerah, yang dimaksudkan untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Meskipun besaran dana ADD masih terbilang terbatas, namun telah mampu menjadi stimulan bagi pelaksanaan pembangunan desa. Bahkan sebagian besar masyarakat desa menyampaikan opininya bahwa kebijakan ADD ini dirasakan lebih bermanfaat. Mekanismenya dirasakan lebih transparan dan partisipatif dan pemanfaatannya lebih demokratis, berdasarkan pada rembug desa.

Pemberian ADD kepada desa, juga dapat dijadikan cerminan terwujudnya good governance, dimana pemerintah dan masyarakat memiliki hubungan yang erat dan sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat, sehingga mendorong akuntabilitas, transparansi dan responsivitas pemerintah lokal.

Beberapa alasan mengapa masyarakat perlu diajak untuk berperan sertadan didorong untuk berpartisipasi, yaitu karena masyarakat memahami sesungguhnya tentang keadaan lingkungan sosial dan ekonomi masyarakatnya, masyarakat mampu menganalisis sebab dan akibat dariberbagai kejadian yang terjadi dalam masyarakat, mampu merumuskan solusi untuk mengatasi permasalahan dan kendala yang dihadapi serta memanfaatkan sumber daya pembangunan (SDA, SDM, dana, teknologi) yang dimiliki untuk meningkatkan produksi dan produktivitas dalam rangka mencapai sasaran pembangunan. Dengan demikian penulis memandang sangat esensialnya menyoroti dan menguak partisipasi masyarakat dalam

pengelolaan ADD. Asumsinya adalah bahwa partisipasi masyarakat selain sebagai upaya mempercepat pembangunan desa, namun juga dapat dilihat sebagai upaya terwujudnya demokratisasi desa.

Secara etimologis, partisiPasi berasal dari bahasa latin pars yang artinya bagiandan capere, yang artinya mengambil, sehingga diartikan “mengambil bagian”. Dalam bahasa inggris, participate atau participation berarti mengambil bagian atau mengambil peran. Sehingga partisipasi berarti mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik suatu negara (Karianga, 2011:213).

Menurut Adisasmita (2006:34) Partisipasi anggota masyarakat adalah keterlibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) program/proyek pembangunan yang dikerjakan didalam masyarakat lokal. Partisipasi atau peran serta masyarakat dalam pembangunan (pedesaan) merupakan aktualitas dari kesediaan dan kemampuan anggota masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi dalam implementasi program/proyek yang dilaksanakan.

Pokok pikiran yang melandasi perlunya partisipasi masyarakat dikemukakan oleh soemantri (Karianga, 2011:214) sebagai berikut yang mengindikasikan penelitian ini :

- a. Memberikan informasi kepada pemerintah.tersebut.
- b. Meningkatkan kesedian masyarakat untuk menerima keputusan.
- c. Membantu perlindungan hukum.
- d. Mendemokarasikan pengambilan keputusan.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif sebagaimana dikemukakan oleh Strauss dan Corbin (Basrowi dkk, 2012:1) mengatakan bahwa metode

penelitian kualitatif sebagai jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lain. Penelitian kualitatif dapat digunakan untuk meneliti kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, Fungsionalisasi organisasi, gerakan sosial, dan Hubungan kekerabatan.

Dasar pertimbangannya adalah penulis ingin menyajikan gambar yang lengkap mengenai permasalahan yang dibahas dan hubungannya dalam penelitian ini. Peneliti ingin memusatkan pada konteks yang dapat menggambarkan dalam bentuk pemahaman dari permasalahan yang sedang diteliti serta mengembangkan teori yang digunakan dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Partisipasi masyarakat begitu penting dalam perencanaan dan pemanfaatan alokasi dana desa, Pokok pikiran yang melandasi perlunya partisipasi masyarakat dikemukakan oleh Soemantri (Karianga, 2011:214) sebagai berikut:

a. Memberikan informasi kepada pemerintah.

Partisipasi masyarakat sangat diperlukan untuk memberikan masukan kepada pemerintah tentang masalah yang ditimbulkan oleh suatu rencana pemerintah dengan berbagai konsekuensinya. Dengan demikian pemerintah akan mengetahui dengan adanya berbagai kepentingan yang dapat terkena tindakan tersebut. Seperti yang terjadi di desa Tanjung Jorong pemerintah merencanakan program air bersih, tapi dengan adanya partisipasi masyarakat, pemerintah bisa melakukan proses tawar-menawar antara kebutuhan masyarakat dengan keinginan pemerintah. Karena masyarakatlah yang mengetahui secara obyektif kebutuhan mereka. Partisipasi masyarakat memberikan masukan kepada pemerintah menyebabkan pemerintah

dapat mengetahui berbagai kepentingan yang dapat terkena tindakan, yang perlu diperhatikan.

b. Meningkatkan kesediaan masyarakat untuk menerima keputusan.

Seorang warga masyarakat yang telah memperoleh kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan cenderung memperlihatkan kesediaan menerima keputusan yang lebih besar dan lebih mudah menyesuaikan diri dengan keputusan itu. Seperti yang terjadi di lokasi sampel, masyarakat menerima dengan baik keputusan rencana program yang dilakukan pemerintah desa karena program pemerintah desa sesuai dengan aspirasi masyarakat pada forum musyawarah desa (musrenbangdes), dan pemerintah desa juga memperhatikan keberatan-keberatan yang di ajukan oleh masyarakat.

c. Membantu perlindungan hukum.

Jika keputusan diambil dengan memperhatikan keberatan-keberatan yang diajukan oleh masyarakat selama proses pengambilan keputusan berlangsung maka setelah keputusan diambil maka keberatan dari warga akan kecil kemungkinannya karena semua alternatif sudah dibicarakan setidaknya sampai tingkat tertentu. Seperti halnya di desa Tanjung Jorong seluruh masyarakat berperan serta terlibat dalam pengambilan keputusan perencanaan program pembangunan yang dibutuhkan masyarakat setempat. Jadi program perencanaan pembangunan yang ada di desa Tanjung Jorong telah melibatkan masyarakat dengan baik.

d. Mendemokrasikan pengambilan keputusan.

Dalam hubungannya dengan partisipasi masyarakat ini, adapun pendapat yang mengatakan dalam pemerintahan dengan sistem perwakilan, maka hak untuk melaksanakan kekuasaan ada pada wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat.

Penelitian yang dilakukan di desa Tanjung Jorong menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat

tergolong rendah, Hal tersebut juga dipengaruhi atas dasar latar belakang pendidikan masyarakat setempat. ADD yang ada di Desa Tanjung Jorong sudah layak dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dalam membangun desa meskipun dana yang dicairkan bertahap dan juga dana yang tersedia masih minimal. Sikap transparansi di Desa Tanjung Jorong sudah diterapkan oleh pemerintah desa kepada masyarakat.

Menurut Pusic (Adisasmita, 2006) berpendapat bahwa perencanaan tanpa memperhitungkan partisipasi masyarakat akan menjadikan perencanaan hanya di atas kertas. Berdasarkan pandangannya, partisipasi atau keterlibatan warga masyarakat dalam pembangunan desa dapat dilihat dari dua hal yaitu:

1. Partisipasi dalam perencanaan

Partisipasi dalam perencanaan dapat dilihat dari dua aspek positif dan negatif. Pada segi positif partisipasi adalah mendorong munculnya keterlibatan secara emosional terhadap program-program pembangunan desa yang telah direncanakan bersama. Sedangkan negatifnya adalah kemungkinan tidak dapat dihindarinya pertentangan antar kelompok dalam masyarakat yang dapat menunda atau bahkan menghambat tercapainya suatu keputusan bersama. Fakta yang ditemui di desa Tanjung Jorong, perencanaan ADD masih sebatas beresensi positif dikarenakan perencanaan ADD dilakukan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat yang diawali dari kegiatan musrenbangdes.

2. Partisipasi dalam Pelaksanaan

Menurut Isbandi Rukminto Adi (2007) dapat dilihat dari dua segi positif dan negatif. Pada sisi positif, partisipasi adalah bagian terbesar dari suatu program yang dapat menyelesaikan pekerjaan. Tetapi segi negatifnya adalah kecenderungan yang menjadikan warga masyarakat sebagai objek pembangunan dimana warga hanya dijadikan pelaksanapembangunan

tanpa didorong untuk mengerti dan menyadaripermasalahan yang mereka hadapi. Sehingga warga masyarakat tidak secara emosional terlibat dalam program, yang berakibat kegagalanseringkali tidak dapat dihindari. Teori ini sepadan dengan realitadilapangan, dimana bila dicermati dari segi positifnya partisipasi di Desa Tanjung Jorong sangatlah memberi nilai positif yang besar bagi diri masyarakat. Dimana ADD yang dilaksanakan telah relevan dengan kebutuhan masyarakat, karena semua kegiatan yang menggunakan dana ADD dengan berdasarkan aspirasi masyarakat melalui musrenbangdes.

Peranan pemerintah daerah maupun pemerintah desa adalah merencanakan dan mengorganisir program ADD dengan menyediakan bantuan teknis dan bantuan bahan-bahan pokok, diluar kemampuan masyarakat setempat dan organisasi-organisasi non pemerintah lainnya. Oleh karenanya partisipasi masyarakat menjadi elemen yang penting dalam pengembangan masyarakat desa, mengingat masyarakat yang memahami dan mengerti kondisi lingkungannya. Berdasarkan pemantauan di lapangan, ADD yang telah bergulir di masyarakat secara implisit bermanfaat bagi masyarakat diantaranya adalah:

- a. Desa dapat menghemat biaya pembangunan, karena desa dapat mengelola sendiri proyek pembangunannya dan hasil-hasilnya dapat dipelihara secara baik demi keberlanjutannya.
- b. Tiap-tiap desa memperoleh pemerataan pembangunan sehingga lebih mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat desa, disebabkan pembangunan di desa-desa sudah mengalami perubahan, jalan rusak telah dilatritkan, masyarakat dengan mudah mengakses jalan dengan mengendarai kendaraan roda empat atau roda dua;
- c. Desa memperoleh kepastian anggaran untuk belanja operasional pemerintahan desa. Sebelum adanya ADD, belanja operasional pemerintahan desa besarnya tidak pasti. Karena dalam

ketentuannya sudah dijelaskan 30% untuk operasional Pemerintah Desa dan 70% untuk pemberdayaan masyarakat.

- d. Desa dapat menangani permasalahan desa secara cepat tanpa harus lama menunggu datangnya program dari pemerintah daerah Kabupaten/Kota.
- e. Desa tidak lagi hanya tergantung pada swadaya masyarakat dalam mengelola persoalan pemerintahan, pembangunan serta sosial kemasyarakatan desa.
- f. Dapat mendorong terciptanya demokrasi di desa. ADD dapat melatih masyarakat dan pemerintah desa untuk bekerjasama, memunculkan kepercayaan antar pemerintah desa dengan masyarakat desa.
- g. Dapat mendorong terciptanya pengawasan langsung dari masyarakat untuk menekan terjadinya penyimpangan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian ini, maka Tingkat partisipasi masyarakat Desa Tanjung Jorong dapat dilihat pada tahap perencanaan, pemanfaatan maupun pengawasan tergolong rendah. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Pusic (2006) bahwa perencanaan tanpa memperhitungkan partisipasi masyarakat akan menjadikan perencanaan hanya di atas kertas. Faktor pendukung dan penghambat di antaranya yaitu : 1) Dukungan dari pemerintah kabupaten dan pemerintah desa yang berkooperatif dan komunikatif dalam meregulasi ADD di wilayah Desa Tanjung Jorong sehingga pelaporan pertanggungjawaban dapat dilaporkan dengan waktu yang telah ditentukan. 2) Sikap pemerintah desa yang transparan, akuntabel dalam pemanfaatan dana ADD. 3) Keterbatasan pada dana ADD yang masih minimalis.

Hendaknya pemanfaatan ADD tidak hanya difokuskan untuk pembangunan fisik tetapi juga untuk kegiatan non

fisik, misalnya pembinaan masyarakat, pengembangan sosial budaya. Masyarakat perlu dilibatkan dalam pembuatan SPJ (surat pertanggung jawaban), agar transparan, bisa dipertanggung jawabkan dan memberdayakan anggota masyarakat yang mempunyai potensi untuk membuat SPJ sekaligus untuk menghindari adanya pelanggaran hukum. Menambah anggaran ADD dari yang semestinya, mengingat ADD yang tersedia masih kurang untuk melanjutkan pembangunan berikutnya. Masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan ADD perlu mendapat pengawasan dari pemerintah desa.

REFERENSI

- Adi, Isbandi Rukminto. 2007. *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas: dari Pemikiran Menuju Penerapan*. Depok: FISIP UI Press.
- Adisasmita, Rahardjo. 2006. *Membangun Desa Partisipatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Basrowi, Surwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Karianga, Hendra. 2011. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*. Bandung: PT. Alumni.
- Gunawan, Imam. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, Edisi kedua. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN. Yogyakarta.
- Meleong, Lexi J. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta : PT. Remaja Rosdakarta
- Soetomo. 2012. *Pembangunan masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung Alfabeta.

Sumarto, Hetifah. 2003. *Inovasi Partisipasi, dan Good Governance*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Wibowo. 2013. *Manajemen Kinerja*. Jakarta: Rajawali Press.